

PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN AKUNTABILITAS TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA

Dara Ramdhana¹, Jhon Andra Asmara^{*2}

^{1,2} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

e-mail: dararamdhana@gmail.com¹, jhon.andra@unsyiah.ac.id^{*2}

* Corresponding Author

<https://dx.doi.org/10.24815/jimeka.v7i3.21392>

Abstract

This study aims to analyze simultaneously and partially the variables of Internal Control, Utilization of Information Technology, and Accountability to the Transparency of Village Fund Management during the Pandemic Period (Study on Villages in Bireuen Regency). This type of research is a quantitative study with a sample of 172 respondents consisting of the village head/village secretary and the head of financial affairs (treasury). The research data were collected through questionnaires, processed and analyzed using multiple linear regression analysis using SPSS version 25 program. The sampling technique used was simple random sampling. The results of this study indicate that Internal Control partially has a positive effect on the Transparency of Village Fund Management. The partial use of Information Technology has a positive effect on the Transparency of Village Fund Management. Accountability partially affects the Transparency of Village Fund Management. Internal Control, Utilization of Information Technology, and Accountability simultaneously affect the Transparency of Village Fund Management.

Keywords: *The Village Head, Internal Control, Utilization of Information Technology, Accountability, Transparency of Village Fund Management.*

1. PENDAHULUAN

Transparansi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah upaya memberikan informasi berkaitan dengan keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dikelolanya dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Transparansi menjadi isu yang sangat penting dalam pemerintahan desa sejak adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikarenakan adanya sejumlah dana yang relatif besar dilakukan pengelolaan kepada pemerintah desa (Julita & Abdullah, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Desa (Kepala Desa) berkewajiban untuk menerapkan prinsip transparansi dalam melaksanakan tugasnya terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini juga didukung dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yaitu asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam pelaksanaannya, menurut Salle (2017) asas transparansi dalam pengelolaan dana desa menjadi sangat penting karena memiliki beberapa tujuan, yaitu pertama dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola keuangan desa. Kedua dengan adanya transparansi maka akan terpenuhinya hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah. Terakhir, dengan adanya transparansi sehingga masyarakat bisa memantau kinerja pemerintah apakah telah sesuai dengan ketentuan.

Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan dana desa yang tidak efektif dan efisien seperti korupsi dan penyelewengan telah menjadi perhatian dalam masyarakat (Munti & Fahlevi, 2017). Fenomena menunjukkan bahwa dalam praktiknya asas transparansi dalam pengelolaan dana desa masih

kurang diterapkan sehingga menimbulkan konflik antara pemerintah desa dengan masyarakat setempat. Seperti kasus yang terjadi di Desa Geulumpang Meujim Jim, Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dimana warga desa melakukan aksi penyegelan kantor desa karena tidak adanya transparansi dalam penggunaan dana desa tahun 2019 (Redaksi, 2020). Mengutip dari Kba.one.com, (2021) bahwa kasus yang serupa juga terjadi di desa Blang Samagadeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen dimana terjadi pengrusakan kantor desa oleh sejumlah pemuda warga desa tersebut dengan alasan karena tidak adanya transparansi dana desa.

Selain itu, terdapat dugaan terjadinya penyelewengan dana desa pada masa pandemi di kabupaten Bireuen dikarenakan adanya anggaran *refocusing* khusus yang ditujukan untuk menanggulangi Covid-19 dan kebencanaan, namun dana tersebut digunakan untuk kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek) (Ruangberita.co.id, 2021). Padahal, berdasarkan surat edaran Pemerintah Kabupaten Bireuen No. 140/140/590 tentang Penundaan Kegiatan Bimtek Aparatur Gampong dalam Masa pandemi Covid-19 menyatakan bahwa dalam rangka mencegah penyebaran pandemi Covid-19 maka untuk sementara waktu menunda penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis bagi aparatur desa hingga berakhirnya masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Bireuen. Hal ini berarti bahwa terdapat penyalahgunaan dana desa yang tidak sesuai dengan anjurannya (Ruangberita.co.id, 2021).

Ketika transparansi diterapkan pada saat penyampaian informasi maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui penyajian informasi yang andal sehingga transparansi pun akan semakin baik juga. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Abubakar et al., (2017) yang menemukan bahwa Aktivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya hasil penelitian Sari (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Begitu pula dengan penelitian Yuliani (2017) yang membuktikan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Asroel, (2016)

dan penelitian Amelia (2015) menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Sebaliknya Ledo (2018) menemukan bahwa Pengendalian internal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini dibuktikan dalam penelitian Sitepu (2020) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh langsung secara positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Begitu juga dengan hasil penelitian Valle-Cruz et al., (2015) yang menemukan bahwa Pemanfaatan teknologi meningkatkan persepsi warga dari transparansi dan efisiensi. Sebaliknya Pratolo & Fadilah, (2022) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa.

Hubungan antara akuntabilitas dengan transparansi ini sejalan dengan hasil penelitian Hermansyah et al. (2018) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas berhubungan positif dengan transparansi. Artinya, semakin meningkat akuntabilitas maka akan diikuti dengan semakin meningkatnya transparansi, demikian pun sebaliknya. Pada penelitian Asroel, (2016) dan penelitian Amelia (2015) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Namun dalam penelitian Rosalia & Zulkarnain (2020) ditemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah sebaliknya akuntabilitas, potensi daerah dan aset daerah secara simultan berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa penelitian ini menarik untuk dilakukan dikarenakan adanya hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang mendeskripsikan perikatan antara agen dengan prinsipalnya yang diciptakan oleh Jensen & Meckling (1976). Jensen & Meckling (1976) mengartikan teori agensi sebagai kesepakatan antara satu maupun lebih banyak orang (*principal*) dalam mempekerjakan orang lain (*agent*) melaksanakan jasa didasarkan identitas mereka dengan memperturutkan pelimpahan otoritas pengambilan keputusan. Menurut Supriyono (2018) teori agensi

adalah teori menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak pemberi kontrak disebut dengan prinsipal dengan agen sebagai penerima kontrak yang bertujuan untuk kepentingan tertentu. Pada pemerintahan desa, yang dimaksud prinsipal ialah masyarakat sedang agennya adalah pemerintah yaitu kepala desa dan aparatur desa lainnya.

Dalam teori agensi terdapat tiga anggapan sifat manusia menurut Eisenhardt (1989), yaitu: pertama *Self interest*, yaitu individu biasanya lebih memprioritaskan dirinya sendiri. Kedua *Bounded rationality*, yaitu individu menempatkan buah pikiran yang sedikit terhadap anggapan untuk kala nantinya. Terakhir *Risk averse*, yaitu individu sering berusaha untuk menghindari risiko. Berdasarkan hal tersebut bisa dilihat bahwa sifat-sifat tersebut merupakan salah satu penyebab timbulnya konflik agensi yang sering terjadi antara aparatur desa dengan masyarakatnya. Aparatur desa cenderung lebih memprioritaskan keperluan dirinya daripada keperluan dalam menambahkan *value* pemerintah (Prayogi, 2019).

Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Menurut Mardiasmo (2018) Transparansi merupakan keterbukaan pihak pemerintah untuk bisa diketahui dan diamati oleh masyarakat dalam menetapkan kebijakan-kebijakan keuangan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Transparansi juga berarti bahwa pemerintah secara berkala memberikan informasi yang bersifat material kepada pihak yang berkepentingan, yaitu masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya (Pakaya *et al.*, 2019). Selanjutnya menurut Prayogi (2019) transparansi merupakan satu diantara prinsip yang diterapkan oleh pemerintah dengan menginformasikan terkait keuangan untuk dapat diakses oleh masyarakat secara jujur dan terbuka.

Transparansi sangat dibutuhkan karena sebagian masyarakat memerlukan data tersebut untuk mendukung pada tahapan pengambilan keputusan yang diambil melalui analisis laporan keuangan pemerintah. Transparansi ini akan berdampak pada peningkatan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui keterbukaan ini akan menghasilkan pertanggungjawaban secara horizontal terhadap masyarakat sehingga pemerintahan dengan citra yang baik dan bersih akan tercipta karena adanya

aspirasi dan terwujudnya kepentingan masyarakat (Nurlailah *et al.*, 2020).

Pengendalian Internal

Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (COSO) mengartikan pengendalian internal sebagai suatu alat yang penting yang dapat memberikan jaminan yang wajar (*reasonable assurance*) atas capaian tujuan tertentu. Pengendalian internal dilaksanakan dengan maksud untuk memverifikasi bahwa proses proses pelaksanaan rencana yang sudah dirancang sejak awal masih sesuai dan dapat terlaksana serta pengendalian internal diharapkan dapat meminimalisir risiko-risiko yang tidak diharapkan.

Peraturan mengenai pengendalian internal diatur dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal ialah “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa teknologi informasi didefinisikan sebagai suatu “Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.”

Teknologi informasi memiliki banyak manfaat dalam membantu pengelolaan dana desa dengan mengolah data menjadi informasi yang meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengolahan data (Perdana, 2018). Selain berfungsi untuk memproses dan menyimpan informasi, teknologi informasi juga bisa berfungsi dalam komunikasi dalam menyebarkan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi didefinisikan sebagai perilaku individu dalam memakai teknologi yang berguna dalam melaksanakan

aktivitas atau tugas nya yang akan membantu meningkatkan kinerja (Aziiz, 2019).

Pemanfaatan teknologi informasi dapat berupa melakukan aktivitas secara elektronik atau digital, pengolahan data, sistem manajemen, serta pengolahan informasi (Perdana, 2018). Pemanfaatan teknologi informasi menjadi hal yang sangat diprioritaskan dalam mengelola data menjadi sebuah informasi yang nantinya akan dipakai oleh para pihak berkepentingan dalam mengambil suatu keputusan sehingga melalui pemanfaatan teknologi informasi akan mempermudah dalam melakukan aktivitas tersebut.

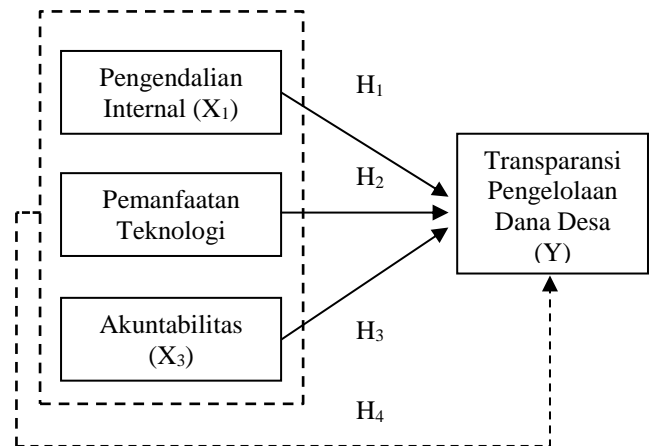
Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas adalah suatu bentuk tanggung jawab publik atas tahapan penganggaran yang dimulai dari tahap rencana, penyusunan hingga pelaksanaan yang wajib disampaikan serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban atas proses penganggaran tersebut bukan hanya sekedar mengetahui anggaran sehingga nantinya masyarakat bisa menilai apakah pemerintah telah bertindak sesuai *Value for money* yaitu ekonomis, efektif dan efisien (Salle, 2017). Akuntabilitas diterapkan dengan maksud agar dapat membandingkan antara perencanaan dengan realisasinya apakah terdapat hambatan atau penyimpangan dan jika ia maka harus diperbaiki dengan harapan bahwa tujuan awal masih bisa terwujud.

Pemerintah sebagai pihak pengelola sumber daya harus memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui besarnya jumlah sumber daya yang dimiliki dan bagaimana pemerintah mengelola dan mengalokasikan sumber daya tersebut (Mada *et al.*, 2017). Jadi akuntabilitas juga dapat bertindak sebagai salah satu alat pengendalian sehingga diperlukan evaluasi kinerja pemerintah untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan dan bagaimana hasil yang diperoleh dalam mengelola sumber daya yang ada.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian kajian teoritis dan penelitian terdahulu maka kerangka konseptual dalam penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis

Atas dasar kerangka pemikiran diatas, maka keputusan sementara (hipotesis) yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa di masa Pandemi.

H2: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa di masa Pandemi.

H3: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa di masa Pandemi.

H4: Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa di masa Pandemi.

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas terhadap transparansi pengelolaan dana desa di masa pandemi (studi pada desa di Kabupaten Bireuen). Jenis investigasi untuk penelitian ini adalah investigasi kausal yang bertujuan untuk menentukan hubungan sebab-akibat yang definitif dan menemukan penyebab dari suatu masalah yaitu untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas terhadap transparansi pengelolaan dana desa di masa

pandemi. Horizon waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah *Cross-Sectional* dimana data yang dikumpulkan dalam satu periode berupa harian, mingguan atau bulanan.

Adapun tujuan studi penelitian ini adalah pengujian hipotesis yaitu menguji pengaruh pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas terhadap transparansi pengelolaan dana desa di masa pandemi. Sedangkan untuk unit analisis penelitian ini adalah wilayah dengan tingkat intervensi pada penelitian ini adalah tingkat intervensi minimal dengan cara penyebaran kuesioner terhadap responden serta situasi studi penelitian ini adalah studi eksperimen lapangan yaitu pada desa di Kabupaten Bireuen.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Bireuen sebanyak 609 desa dari 17 kecamatan. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *Simple random sampling*. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin maka sampel dalam penelitian ini dipilih sebanyak 86 desa.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini membutuhkan sumber data berupa data primer berupa kuesioner Kuesioner dibagikan kepada aparatur desa yang terdiri atas Kepala Desa/Sekretaris Desa dan Bendahara (Kepala Urusan Keuangan).

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data digunakan untuk menguji hipotesis yang ada dengan metode analisis regresi linear berganda. Selanjutnya data tersebut dihitung serta diolah dengan menggunakan SPSS atau *Statistical Product and Service Solution 25 for Windows*.

Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen dalam penelitian ini meliputi pengendalian internal (X₁), pemanfaatan teknologi informasi (X₂) dan akuntabilitas (X₃). Adapun variabel dependen yaitu transparansi pengelolaan dana desa (Y).

4. HASIL DAN PENELITIAN

Karakteristik Responden Penelitian Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jawaban Responden	
		Frekuensi	Persen
1.	Laki-laki	157	91,3
2.	Perempuan	15	8,7
Total		172	100,0

Sumber: Data primer, tahun 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa responden Perempuan memiliki persentase sebesar 8,7% sedangkan 91,3% nya adalah Laki-laki.

Responden Berdasarkan Usia

Tabel 2. Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah Responden	Persentase
1.	21-30 tahun	14	8.1%
2.	31-40 tahun	82	47.7%
3.	41-50 tahun	52	30.2%
4.	>50 tahun	24	14.0%
Total		172	100%

Sumber: Data primer, tahun 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa berdasarkan usia, dari 172 responden, paling banyak responden adalah yang berusia 31 sampai 40 tahun dengan total 82 orang (47.7%), usia 41 sampai 50 tahun sebesar 52 orang (30.2%), usia lebih dari 50 tahun sebesar 24 orang (14.0%), dan usia 21 sampai 30 tahun sebesar 14 orang (8.1%).

Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jawaban Responden	
		Frekuensi	Persen
1.	SMP	1	0,6
2.	SMA	140	81,4
3.	D2	1	0,6
4.	D3	2	1,2
5.	S1	27	15,7
6.	S2	1	0,6
Total		172	100,0

Sumber: Data primer, tahun 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 3 bahwa dari 172 orang responden, pendidikan terakhir responden terbanyak adalah SMA sebanyak 140 responden (81,4%), sedangkan yang terkecil adalah pendidikan SMP, D2, dan S2 yaitu masing-masing sebanyak 1 orang (0,6%).

Responden Berdasarkan Jabatan

Tabel 4. Identitas Responden Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jawaban Responden	
		Frekuensi	Persen
1.	Bendahara	86	50,0
2.	Kepala Desa	80	46,5
3.	Sekretaris Desa	6	3,5
Total		172	100,0

Sumber: Data primer, tahun 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4 bahwa jabatan responden terbanyak adalah bendahara yaitu 86 orang atau 50%, jabatan kepala desa sebanyak 80 orang atau 46,5%,

dan jabatan sekretaris desa sebanyak 6 orang atau 3,5%.

Responden Berdasarkan Masa Jabatan

Tabel 5. Identitas Responden Berdasarkan Masa Jabatan

No.	Masa Jabatan	Jawaban Responden	
		Frekuensi	Persen
1.	1-5 Tahun	134	77,9
2.	5-10 Tahun	38	22,1
Total		172	100,0

Sumber: Data primer, tahun 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5 bahwa responden dengan masa jabatan 1 sampai 5 tahun sebanyak 134 orang atau 77,95, sedangkan masa jabatan 5 sampai 10 tahun sebanyak 38 orang atau 22,1%.

Pengujian Kualitas Data Uji Normalitas

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	Variabel	Koefisien Korelasi	Nilai r-kritis (n=172)	Keterangan
PI1	Pengendalian Internal	0,774	0,1497	Valid
PI2		0,723		
PI3		0,704		
PI4		0,775		
PI5		0,889		
PI6		0,901		
PI7		0,889		
PI8		0,901		
PI9		0,896		
PTI1	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,769	0,1497	Valid
PTI2		0,817		
PTI3		0,752		
PTI4		0,728		
PTI5		0,746		
A1	Akuntabilitas	0,862	0,1497	Valid
A2		0,723		
A3		0,885		
A4		0,745		
A5		0,845		
TPDD1	Transparansi Pengelolaan Dana Desa	0,870	0,1497	Valid
TPDD2		0,854		
TPDD3		0,847		
TPDD4		0,856		
TPDD5		0,855		
TPDD6		0,802		
TPDD7		0,848		

Sumber: Data primer, tahun 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel 6 dapat diartikan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid dikarenakan seluruh variabel memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau nilai tingkat signifikansinya $< 0,05$ yaitu sebesar 0,1497 sehingga seluruh pernyataan dalam kuesioner penelitian ini dapat dilanjutkan untuk penelitian yang lebih mendalam.

Uji Reliabilitas

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach Alpha	Ket
Pengendalian Internal	9	0,994	Andal
Pemanfaatan Teknologi Informasi	5	0,820	Andal
Akuntabilitas	5	0,873	Andal
Transparansi Pengelolaan Dana Desa	7	0,993	Andal

Sumber: Data primer, tahun 2022 (diolah)

Hasil pengolahan data menunjukkan nilai *cronbach alpha* untuk masing-masing variabel > 0.600 sehingga kesimpulan yang didapat bahwa seluruh pernyataan variabel dinyatakan sudah andal.

**Pengujian Asumsi Klasik
Uji Normalitas**

Tabel 8. Uji Normalitas

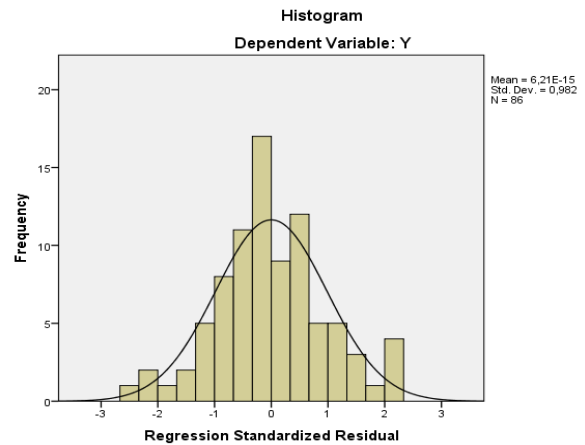
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,29736518
Most Extreme Differences	Absolute	,057
	Positive	,057
	Negative	-,048
Test Statistic		,057
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Hasil Output SPSS (2022)

Tabel 8 membuktikan bahwa dari uji normalitas penelitian ini terdapat nilai signifikansi sebesar 0,200 atau $> 0,05$ artinya data residual berdistribusi secara normal. Hasil dari uji diatas juga didukung dengan hasil analisis grafik, yaitu grafik histogram maupun

grafik *Normal Probability Plot* seperti terlihat pada gambar 2 dan 3 berikut.

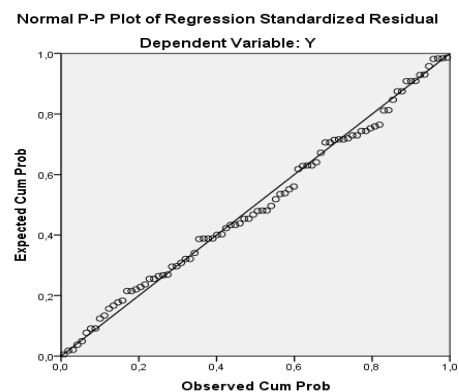
Berdasarkan grafik Histogram pada Gambar 2 dibawah dapat diambil kesimpulan bahwa pola distribusi data telah mendekati normal.



Sumber: Hasil Output SPSS(2022)

Gambar 2. Grafik Histogram

Berdasarkan grafik *Normal Probability Plot* Gambar 2 dibawah terlihat titik-titik sebaran mengikuti garis diagonalnya atau garis normal. Oleh karenanya data dinyatakan telah berdistribusi normal.



Sumber: Hasil Output SPSS(2022)

Gambar 3. Normal Probability Plot

Uji Multikolinearitas

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

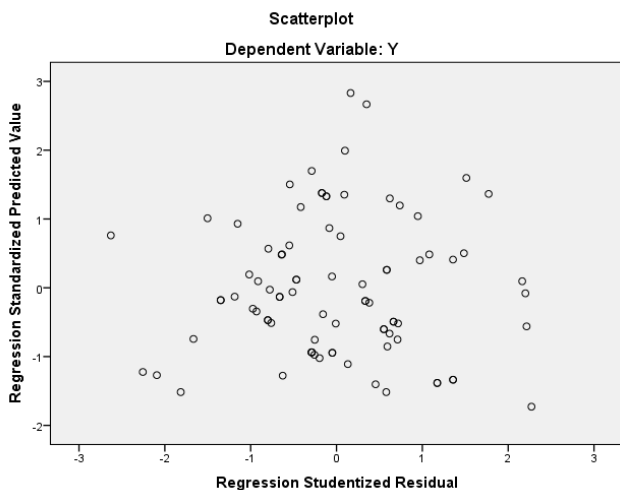
Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengendalian Internal	0,683	1,464	Bebas dari Multikolinieritas
Pemanfaatan Teknologi	0,465	2,149	Bebas dari Multikolinieritas

Informasi				
Akuntabilitas	0,415	2,412	Bebas	dari
Multikolinieritas				

Sumber: Data primer, tahun 2022 (diolah)

Dari Tabel 9 tersebut bisa membuktikan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10, hal ini mempunyai makna bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel independen. Demikian pula dengan hasil perhitungan nilai *VIF* yang memperlihatkan hasil yang sama sehingga seluruh variabel independen memiliki nilai *VIF* <10. Jadi kesimpulannya adalah tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen pada model regresi di dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data primer, tahun 2022 (diolah)

Gambar 4. Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil pengujian yang dapat dilihat dari gambar diatas bahwa keseluruhan titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga bisa dinyatakan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Nama Variabel	b	Standar Error	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
(Constant)	0,495	0,376	1,316	1,986	0,192

Nama Variabel	b	Standar Error	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
Pengendalian Internal	0,255	0,092	2,759	1,986	0,007
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,346	0,125	2,760	1,986	0,007
Akuntabilitas	0,319	0,118	2,714	1,986	0,008

Koefisien Korelasi (R) = 0,739
 Koefisien Determinasi (R Square) = 0,545
 Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) = 0,529
 F_{hitung} = 32,791
 F_{tabel} = 2,72
 Sig. F = 0.000

Sumber: Data primer, tahun 2022 (diolah)

Dengan demikian maka hasil perhitungan statistik dapat dituliskan persamaan regresi linear berganda simultan sebagai berikut :

$$Y = 0,495 + 0,255X_1 + 0,346X_2 + 0,319X_3, \dots \dots \dots (1)$$

Dari hasil persamaan regresi diatas diketahui hasil dari penelitian sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 0,495, artinya jika variabel Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Akuntabilitas bernilai nol atau konstan, maka variabel Transparansi Pengelolaan Dana Desa akan bernilai 0,495 atau 49,5%.
2. Koefisien regresi pengaruh Pengendalian Internal sebesar 0,255 menjelaskan setiap adanya kenaikan satu satuan pada Pengendalian Internal maka akan dapat meningkatkan Transparansi Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,255 artinya terdapat pengaruh positif variabel Pengendalian Internal terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa.
3. Koefisien regresi pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 0,346 menjelaskan setiap adanya kenaikan satu satuan pada Pemanfaatan Teknologi Informasi yang dirasakan responden maka akan dapat meningkatkan Transparansi Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,346 artinya terdapat pengaruh positif variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa.
4. Koefisien regresi pengaruh Akuntabilitas sebesar 0,319 menjelaskan setiap adanya kenaikan satu satuan pada Akuntabilitas yang dirasakan

responden maka akan dapat meningkatkan Transparansi Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,319 artinya terdapat pengaruh positif variabel Akuntabilitas terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa.

Koefisien Determinasi

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model Summary ^b				
Model	R	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate	
1	,739 ^a	,545	,529	,30276

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil output SPSS (2022)

Berdasarkan hasil output SPSS didapatkan nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,545. Nilai tersebut mengartikan bahwa peran variabel Pengendalian Internal (X₁), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₂), dan Akuntabilitas (X₃) dalam mempengaruhi Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Y) adalah sebesar 54,5%. Selanjutnya, terdapat nilai sisa dari peran variabel tersebut adalah sebesar 0,455 atau 45,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak terdapat di dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Uji Simultan

Tabel 12. Tabel Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9,017	3	3,006	32,791	,000 ^b
	Residual	7,516	82	,092		
	Total	16,533	85			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber : Data primer, tahun 2022 (diolah)

Berdasarkan hasil pembagian *Mean Square* regresi dengan *Mean Square* residual diperoleh nilai F hitung sebesar 32,791 dengan batasan nilai probabilitas signifikansinya sebesar 0,000. Sementara nilai F tabel pada taraf signifikan 5% dan *df* 82 adalah sebesar 2,72. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F hitung (32,791) lebih besar dari F tabel (2,72) sehingga keputusan yang dapat diambil yaitu hipotesis alternatif (H_a) diterima dan menolak hipotesis H₀, artinya Pengendalian Internal (X₁), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₂), dan Akuntabilitas (X₃) berpengaruh terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Y) secara bersama-sama.

Uji Parsial

Tabel 13. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	,495	,376		1,316	,192			
X1	,255	,092	,249	2,759	,007	,683	1,464	
X2	,346	,125	,301	2,760	,007	,465	2,149	
X3	,319	,118	,314	2,714	,008	,415	2,412	

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Output SPSS (2022)

a. Berdasarkan hasil perhitungan dengan membandingkan antara nilai koefisien regresi dengan standar *error* didapatkan nilai t hitung untuk pengaruh variabel Pengendalian Internal sebesar 2,759 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,986 dengan batasan nilai probabilitas signifikansi 0,000. Dari hasil perbandingan ini dapat diambil suatu keputusan bahwa menerima hipotesis alternatif (H_a) dan hipotesis nol (H₀) ditolak, artinya Pengendalian Internal (X₁) secara

parsial berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa(Y).
b. Berdasarkan hasil perhitungan dengan membandingkan antara nilai koefisien regresi dengan standar *error* didapatkan nilai t hitung untuk pengaruh variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 2,760 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,986 dengan batasan nilai probabilitas signifikansi 0,000. Dari hasil perbandingan ini dapat diambil suatu keputusan

bahwa menerima hipotesis alternatif (H_a) dan hipotesis nol (H_0) ditolak, artinya Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Y).

- c. Berdasarkan hasil perhitungan dengan membandingkan antara nilai koefisien regresi dengan standar *error* didapatkan nilai t hitung untuk pengaruh variabel akuntabilitas sebesar 2,714 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,986 dengan batasan nilai probabilitas signifikansi 0,000. Dari hasil perbandingan ini dapat diambil suatu keputusan bahwa menerima hipotesis alternatif (H_a) dan hipotesis nol (H_0) ditolak, artinya Akuntabilitas (X_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Y).

Pembahasan

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji-t dapat diketahui bahwa variabel pengendalian internal memiliki nilai t-hitung sebesar 2,759 yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai $t_{\text{-tabel}}$ sebesar 1,986. Nilai signifikansi Uji-t untuk variabel pengendalian internal sebesar 0,000 yang memiliki nilai lebih kecil dari taraf signifikansinya sebesar 0,05. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa bahwa Pengendalian Internal (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Y).

Pada teori agensi dijelaskan bahwa prinsipal memiliki tujuan yang berbeda dengan agennya sehingga sering kali menimbulkan konflik antara keduanya. Untuk menghindari adanya konflik tersebut maka transparansi dalam pengelolaan dana desa perlu diterapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan dana desa adalah pengendalian internal. Pengendalian internal dibutuhkan dengan tujuan agar dapat menghadirkan kepercayaan yang memadai terhadap aspek efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku atas pengelolaan dana desa.

Pentingnya pengendalian internal dalam transparansi didukung oleh penelitian Abubakar et al. (2017) yang menemukan bahwa Aktivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap

transparansi keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya hasil penelitian Sari (2017) dan Yuliani (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Begitu juga dengan hasil penelitian Asroel, (2016) dan penelitian Amelia, (2015) menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Sebaliknya Ledo (2018) menemukan bahwa Pengendalian internal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji-t dapat diketahui bahwa variabel pengendalian internal memiliki nilai t-hitung sebesar 2,760 yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai $t_{\text{-tabel}}$ sebesar 1,986. Nilai signifikansi Uji-t untuk variabel pengendalian internal sebesar 0,000 yang memiliki nilai lebih kecil dari taraf signifikansinya sebesar 0,05. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa bahwa Pemanfaatan teknologi informasi (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Y).

Teori agensi mengemukakan bahwa dalam mencapai kepentingan pribadi, agen memanfaatkan asimetris informasi dan konflik kepentingan dengan menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal. Dalam mencegah konflik keagenan tersebut, pemanfaatan teknologi informasi berguna untuk meningkatkan keakuratan informasi yang disampaikan oleh prinsipal sebagai bentuk penerapan asas transparansi. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kepercayaan atas informasi yang disampaikan agen sehingga akan meningkatkan hubungan yang baik antara prinsipal dengan agennya.. Oleh karenanya pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi transparansi pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Sitepu (2020) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Begitu juga dengan hasil penelitian Valle-Cruz et al. (2015) yang menemukan bahwa Pemanfaatan teknologi meningkatkan persepsi warga terhadap transparansi.

Namun berbeda dengan penelitian Pratolo & Fadilah (2022) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji-t dapat diketahui bahwa variabel pengendalian internal memiliki nilai t-hitung sebesar 2,714 yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,986. Nilai signifikansi Uji-t untuk variabel pengendalian internal sebesar 0,000 yang memiliki nilai lebih kecil dari taraf signifikansinya sebesar 0,05. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas (X_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Y).

Dalam teori agensi terdapat salah satu konsep yang menyatakan bahwa agen memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi laporan keuangan bagi prinsipal untuk menilai bentuk pertanggungjawaban agen. Dalam hal ini bentuk pertanggungjawaban agen bukan hanya dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang lengkap dan wajar namun bagaimana agen dapat memberikan akses kepada prinsipal untuk menggunakan informasi tersebut. Oleh karenanya dalam transparansi pengelolaan dana desa, aspek akuntabilitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya sehingga semakin baik akuntabilitas maka akan semakin baik juga transparansi.

Oleh karenanya akuntabilitas memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan transparansi sesuai dengan hasil penelitian Hermansyah *et al.* (2018) yang menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara akuntabilitas dengan transparansi. Pada penelitian Asroel (2016) dan Amelia (2015) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Rosalia & Zulkarnain (2020) yang menemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah.

Pengaruh Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Akuntabilitas terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil output SPSS didapatkan nilai F hitung sebesar 32,791 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Selanjutnya nilai F tabel pada df 82 adalah sebesar 2,72 dan nilai taraf signifikan sebesar 5%. Dengan demikian nilai F hitung (32,791) lebih besar dari F tabel (2,72) maka dapat diambil kesimpulan untuk menerima hipotesis alternatif (H_a) dan menolak hipotesis H_0 , artinya Pengendalian Internal (X_1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2), dan Akuntabilitas (X_3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Y).

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Akuntabilitas dilaksanakan secara baik dan bersamaan maka transparansi pengelolaan dana desa akan semakin meningkat. Dengan melaksanakan pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas maka akan terjadi peningkatan kualitas informasi yang disampaikan agen sehingga kepercayaan dan kepuasan prinsipal akan meningkat.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan dana desa.
2. Pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan dana desa
3. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan dana desa.
4. Pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan dana desa.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan responden yang hanya terdiri atas Kepala Desa/Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan sehingga hasilnya masih kurang untuk mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Proses pengambilan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner sehingga jawaban responden hanyalah persepsi responden.

Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang belum dibahas dalam penelitian ini dan dapat mempengaruhi transparansi pengelolaan dana desa.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel yang akan diteliti dan responden sebagai pengisi kuesioner.

Daftar Pustaka

- Abubakar, A. A., Dibal, N. A., Amade, P., & Joyce, P. (2017). Effect of Internal Control Activity on Financial Accountability and Transparency in Local Government Areas of Borno State, Nigeria. *European Journal of Business and Management* *Www.iiste.Org ISSN*, 9(30), 58–65. www.iiste.org
- Amelia, R. (2015). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Tekanan Eksternal dan Komitmen Pimpinan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1–15.
- Asroel, R. B. S. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Pimpinan, dan Pengendalian Internal terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.
- Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management*, 14(1), 57–74.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hermansyah, I., Rahman, R., & Suherman, M. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Survei Pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 21–29.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 77–132. <https://doi.org/10.2139/ssrn.94043>
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 213–221. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15556>
- kba.one.com. (2021). *Warga sesalkan oknum geuchik main lapor tanpa lihat sebab*. Diakses dari: <https://www.kba.one/news/warga-sesalkan-oknum-geuchik-main-lapor-tanpa-lihat-sebab/index.html>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa, Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Ledo, D. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Pengendalian Internal, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, dan Penerapan Sap Berbasis Akruar terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kota. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(3).
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*. 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh.

- Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 172–182.
<https://doi.org/10.18196/jai.180281>
- Nurlailah., Syamsul., Rahman, A. (2020). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa : *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 151–165.
- Pakaya, N., Rorong, A., & Tulus, F. (2019). Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Kamanga Kecamatan Tompas. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(74), 1–23.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Perdana, K. W. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi*.
- Pratolo, S., & Fadilah, A. G. (2022). The Effects of Human Resources and Information Technology Utilization toward Transparency of Village Financial Management with Organizational Commitment as a Moderated Variable (Empirical Study in Bantul Regency). *Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation Track Accounting and Management Sciences (ICOSIAMS 2021)*, 201. 276–283.
<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.211225.038>
- Prayogi, R. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Balapulang Wetan)*. Tesis. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Harianakyataceh.com. (2020). *Puluhan Warga Geulumpang Meujim Jim Segel Kantor Desa*. Diakses dari: <https://harianakyataceh.com/2020/07/09/puluhan-warga-geulumpang-meujim-jim-segel-kantor-des/>
- Rosalia., & Zulkarnain, P. D. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Potensi Daerah dan Aset Daerah terhadap Transparansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(2), 167-176.
- Ruangberita.co.id. (2021). *Dugaan Penyelewengan Dana Desa DPRK Bireuen Sangat Parah dan Massiv*. Diakses dari: <https://ruangberita.co/news/dugaan-penyelewengan-dana-desa-dprk-bireuen-sangat-parah-dan-massiv/index.html>
- Salle, A. (2017). Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 1(1), 1–19. <https://doi.org/10.52062/keuda.v1i1.740>
- Sari, E. W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu. *JOMFekom*, 4(1), 843–857.
- Sitepu, A. P. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Provinsi Kepulauan Riau. *Cash*, 3(02), 1–10.
<https://doi.org/10.52624/cash.v3i02.1285>
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Valle-Cruz, D., Sandoval-Almazan, R., & Ramon Gil-Garcia, J. (2015). The effects of technology use on efficiency, transparency, and corruption in municipal governments: Preliminary results from a citizen perspective. *ACM International Conference Proceeding Series, 27-30-May*, 289–294. <https://doi.org/10.1145/2757401.2757412>
- Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 24(1), 1–14.